



Peran Partai Gerindra dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2024 di Kota Medan

Fatiya Nur Rahma^{1*}, Windawati Pinem²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email correspondence: fatiyanurrahma100803@gmail.com*

Keywords :

gerindra party, first-time voter participation, 2024 regional elections.

Kata Kunci :

partai gerindra, partisipasi pemilih pemula, pilkada 2024.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Gerindra Party in increasing the participation of first-time voters in the 2024 regional elections in Medan City. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used in this study include in-depth interviews and documentation. The results show that the Gerindra Party has carried out its political socialization and communication functions through various media and activities. However, the reality on the ground shows that only a portion of first-time voters receive direct socialization invitations. On the other hand, the form of political communication delivered through social media is not fully accessible to first-time voters, considering that some of them rarely or even actively use social media. This finding confirms that although political parties have carried out their functions in the context of political socialization and communication, their effectiveness still faces obstacles related to limited access and participation of first-time voters. Therefore, a more inclusive and adaptive political communication strategy is needed so that political messages can be received equally by all voter segments, especially the younger generation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai gerindra dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024 di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai gerindra telah menjalankan fungsi sosialisasi dan komunikasi politik melalui berbagai media dan kegiatan. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan hanya sebagian pemilih pemula yang memperoleh undangan sosialisasi secara langsung. Di sisi lain, bentuk komunikasi politik yang disampaikan melalui media sosial tidak sepenuhnya terjangkau oleh pemilih pemula, mengingat sebagian dari mereka jarang atau bahkan tidak aktif membuka media sosial. Temuan ini menegaskan meskipun fungsi partai politik dalam konteks sosialisasi dan komunikasi politik telah dijalankan, efektivitasnya masih menghadapi kendala terkait keterbatasan akses dan partisipasi pemilih pemula. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi politik yang lebih inklusif dan adaptif agar pesan politik dapat diterima secara merata oleh seluruh segmen pemilih, khususnya generasi muda.

PENDAHULUAN

Suatu demokrasi menjadi fondasi bagi terwujudnya kedaulatan rakyat, dimana suara dan aspirasi masyarakat merupakan penentu dalam pengambilan keputusan politik. Sebagai bagian dari hak politiknya, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih (Silalahi, Pinem, & Sembiring, 2025). Salah satu aspek penting dalam demokrasi yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan ataupun keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan politik dalam sebuah negara. Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam politik di suatu negara berperan penting dalam menentukan mutu demokrasi atau tata kelola pemerintahan yang berjalan. Demokrasi mustahil berjalan optimal tanpa adanya keterlibatan atau peran serta dari warga negara dalam politik (Darmila, Ivanna, & Iqbal, 2019). Partai politik merupakan salah satu media yang dapat membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui fungsi-fungsinya. Adapun fungsi dari partai politik adalah sosialisasi, pendidikan politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, dan pengatur konflik. Melalui fungsi-fungsi tersebut, partai politik diharapkan mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Pemilih pemula menjadi segmen yang paling penting dalam meningkatkan partisipasi politik. Dalam penelitian ini, pemilih pemula memiliki rentang usia dari 17-21 tahun. Biasanya pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang rentan mengalami kebingungan pada saat pemilu maupun pilkada. Hal ini dikarenakan masih minimnya pendidikan politik yang mereka dapatkan. Oleh karena itulah partai politik diharapkan mampu memberikan pendidikan politik sehingga dapat meningkatkan partisipasi politiknya. Terlebih lagi, dari total sekitar 200 juta pemilih pada Pilkada 2024, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa lebih dari separuhnya merupakan pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z. Proporsinya mencakup sekitar 33% untuk generasi milenial (kelahiran 1981–1996) dan sekitar 22% untuk generasi Z (kelahiran 1997–2012) (Astuti, 2024).

Partai politik pada era demokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas partisipasi politik masyarakat. Tidak hanya itu saja, partai politik juga menjadi penghubung antara pemerintah, pendapat umum, serta memilih para pemimpin. Sebagai salah satu bagian dari infrastruktur politik yang menjalankan fungsi politik tertentu.

Melalui partai politik, diharapkan setiap permasalahan yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dapat tersalurkan sebaik-baiknya. Bukan hanya sekadar menghadapi permasalahan, tetapi masyarakat juga memiliki harapan aspirasinya dapat tersampaikan sehingga tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Selanjutnya, masyarakat dapat lebih meningkatkan partisipasi politik melalui partai politik. Selain itu, partisipasi politik terhadap pemilihan umum yang baik

mencerminkan tingkat keberhasilan dari suatu partai. Untuk mendorong partisipasi yang tinggi pada pemilu ataupun pemilukada, partai harus bisa mendapatkan loyalitas pemilih. Selain loyalitas pemilih, partai politik juga harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan, dengan adanya kepercayaan terhadap partai politik, maka masyarakat akan meletakkan ekspektasi bahwa partai ataupun calon kandidat yang dipilih akan memberikan dampak positif terhadap mereka.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam Pilkada Kota Medan terbilang masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tren kehadiran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilukada dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- Pilkada Tahun 2005: tingkat partisipasi sebesar 54,70%.
- Pilkada Putaran I Tahun 2010: tingkat partisipasi sebesar 35,69%.
- Pilkada Putaran II Tahun 2010: tingkat partisipasi sebesar 38,29%.
- Pilkada Tahun 2015: tingkat partisipasi sebesar 25,56%.
- Pilkada Tahun 2020: tingkat partisipasi sebesar 46,77%.
- Pilkada Tahun 2024: tingkat partisipasi sebesar 34,81%.

Berdasarkan isu ini, partai politik memiliki tanggung jawab untuk mengatasi menurunnya jumlah pemilih pemula yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran partai gerindra dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula sebagai bagian dari fungsi partai politiknya.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas topik yang sama, diantaranya penelitian oleh Winda Anggraeni Panggabean (2019), yang menjelaskan bahwa partai politik berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik, meskipun fokus kajian lebih menekankan pada kelompok masyarakat umum dan bukan khusus pemilih pemula, serta partai yang diteliti ialah PDIP, bukan Gerindra. Selanjutnya, penelitian dari Agung Valeska Pratama, dengan judul "Peningkatan Partisipasi Pemilih Oleh Partai Politik Gerindra di Kota Tangerang Provinsi Banten". Penelitian ini berfokus pada strategi-strategi yang dilakukan partai yang tidak diambil melalui fungsinya. Kemudian, penelitian oleh Benito Asdhie Kodiyat MS & Andryan (2021), dengan judul "Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020". Penelitian ini terfokus pada pengaruh partai politik tersebut terhadap pemilih pemula. Dilanjutkan penelitian dari Lusy Asa Akhrani, Fitsabilla Imansari & Faizah (2018), dengan judul "Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula". Penelitian ini mengungkapkan hubungan yang signifikan antara kepercayaan politik dan partisipasi politik. Artinya, semakin tinggi kepercayaan seseorang terhadap politik, semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Pemilih pemula memainkan peran krusial bagi partai politik, mewakili sekitar 20% dari total pemilih. Penelitian oleh Mahyudin, Andi Reni, Darni, Hasimin (2022),

dengan judul “Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula”. Hasil dari penelitian tersebut ialah pelaksanaan sosialisasi mengenai peran penting pemilih pemula sangat bermanfaat dalam mendorong peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih yang diharapkan berperan aktif dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu, untuk menghindari terjadinya golongan putih (golput) didalam masyarakat.

Adapun novelty dalam penelitian ini yaitu partai politik tidak selalu menjadi fasilitator bagi pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi politik. Hal inilah yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian lainnya yang kebanyakan melihat partai politik sebagai media untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis peran partai gerindra dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024 di Kota Medan.

LANDASAN TEORI

Partai Politik

Dalam buku *Capitalism , Socialism , and Democracy* , Joseph Schumpeter menyatakan bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang menjadi anggota suatu kelompok pada dasarnya berkepentingan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan di partai dan politik, yang berfungsi sebagai model untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat umum untuk bertindak secara independen dari organisasi mereka, dan mereka secara terbuka terlibat dalam pengembangan keterampilan politik , seperti tindakan praktis , yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan (Labolo & Ilham, 2015).

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik , partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh seluruh warga negara Indonesia secara terbuka berdasarkan asas keinginan dan tujuan dalam memperjuangkan hak - hak warga negara , hak-hak seluruh rakyat, hak-hak bangsa, dan hak-hak negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tahun 2008 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh seluruh warga negara Indonesia secara transparan berdasarkan asas kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan hak asasi warga negara, rakyat , dan bangsa. Bangsa, dan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai NKRI Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 .

Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki fungsi sebagai mediator dari berbagai permasalahan yang diselesaikan melalui proses politik, dengan pencarian dan penguatan kekuasaan melalui pemilihan umum (Fales, 2018). Kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia diwarnai oleh berbagai kompleksitas. Keberagaman etnis dan tingkat religiusitas yang tinggi menjadi faktor yang ikut mempercepat proses polarisasi diantara kelompok-kelompok pendukungnya. Studi mengenai kecenderungan

pilihan politik berdasarkan latar belakang etnis telah memperoleh perhatian yang cukup luas. Fokus utama kajian tersebut terletak pada bagaimana kelompok etnis dapat dimobilisasi oleh partai politik ataupun organisasi tertentu dalam rangka mencapai tujuan politiknya (Mukmin, 2012).

Apabila merujuk kembali pada *literature* politik yang ada (Jurdi, 2019) dalam bukunya mengatakan terdapat 7 (tujuh) fungsi partai politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi, diantaranya:

a. Sosialisasi Politik

Menurut Budiardjo dalam (Nababan, 2012), Sosialisasi politik ialah suatu proses di mana seseorang melewati tahap-tahap tertentu akan mendapatkan pandangan mengenai peristiwa atau dinamika dalam dunia politik, yang biasanya diterapkan di lingkungan masyarakat tempat seseorang berada. Sosialisasi Politik bertujuan untuk menumbuhkan sikap dan perilaku serta orientasi politik pada masyarakat dalam menyampaikan informasi-informasi politik. Adapun fungsi dari sosialisasi politik ini yaitu untuk mencapai tujuan dalam menciptakan citra partai tersebut (*image*) bahwa ia mencoba mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

b. Rekrutmen Politik

Suatu fungsi terpenting partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan seleksi kaderisasi politik, baik kaderisasi Kepemimpinan dalam partai politik ataupun kepemimpinan partai secara nasional yang lebih luas. Kualitas calon pemimpin bangsa sangat dipengaruhi oleh efektifitas fungsi rekrutmen dan sistem kaderisasi di partai politik. Partai politiklah yang sejatinya mampu menyediakan atau menghasilkan para kader yang berkualitas untuk duduk di lembaga parlemen.

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan wujud dari perilaku maupun tindakan politik yang mencerminkan citra, sikap dan pandangan politik individu sebagai respons aktif terhadap pengaruh komunikasi politik yang diterima oleh warga negara (Ivanna, Pardede, & Iqbal, 2018). Masyarakat terlibat pada tahap penyusunan dan implementasi Peraturan atau keputusan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat umum serta dalam proses pengambilan keputusan politik disebut dengan partisipasi politik (Siregar, Manik, Manurung, Harahap, & Ivanna, 2024). Fungsi partai politik diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

d. Pemandu Kepentingan

Dalam masyarakat, terdapat sejumlah perbedaan kepentingan, yang bahkan juga bertolak belakang. Disinilah salah satu fungsi dari partai politik ialah untuk menganalisis serta mengevaluasi, dan juga memadukan berbagai perbedaan kepentingan yang berbeda dan bertentangan.

e. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan kegiatan untuk menyebarluaskan

informasi politik dari pemerintah kepada publik dan begitupun sebaliknya. Komunikasi politik berfungsi sebagai jalur guna menyalurkan keinginan atau pendapat masyarakat kepada pemerintah. Partai politik disini fungsinya sebagai perantara (*broker*) dan sebagai pendengar atas keluhan kesah dari masyarakat. Keberhasilan komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh kualitas pemasaran politik yang memastikan adanya gagasan atau kebijakan yang baik, biaya politik yang realistis, dan terutama promosi atau penyampaian pesan yang efektif. Pesan-pesan politik ini dapat disebarluaskan melalui saluran komunikasi konvensional seperti sosialisasi, kampanye, serta media cetak dan elektronik (Sihite, Br. Sembiring, Rachma, & Ivanna, 2024).

f. Pengendalian Konflik

Dalam sistem demokrasi, ada persaingan dan pandangan yang beragam diantara masyarakat adalah suatu hal yang normal. Ketika konflik muncul di dalam pemerintahan, partai politik mencoba menyelesaikannya dengan membawa masalah tersebut ke forum musyawarah Badan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh jalan penyelesaian yang berupa keputusan dari partai-partai politik.

g. Kontrol Politik

Kontrol politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan politiknya, partai politik wajib mematuhi standar-standar penilaian, hal ini disebabkan karena standar penilaian merupakan hasil kesepakatan bersama, maka standar tersebut harus digunakan sebagai pedoman bersama. (Surbakti, 1992).

Partisipasi Politik

Secara sederhana, partisipasi politik didefinisikan sebagai suatu bentuk keterlibatan. Dalam ranah politik, partisipasi politik mengacu pada keterlibatan warga negara dalam berbagai proses politik. Keterlibatan ini tidak terbatas pada pemberian dukungan terhadap keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh para pemimpin. Oleh karena itu, jika warga negara hanya memberikan dukungan tanpa mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat, kondisi ini lebih tepat disebut mobilisasi politik (Huda, 2018). Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik ialah kehadiran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penentuan suatu keputusan yang menyangkut dan memberikan pengaruh dikehidupannya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian dari partisipasi politik adalah suatu keterlibatan warga negara untuk turut serta dalam proses politik, misalnya dalam memilih pemimpin negara, ikut memantau dalam tahapan dari suatu kebijakan yang mencakup proses dari pengambilan keputusan hingga evaluasi.

Partisipasi politik lebih menekankan terhadap aktivitas yang dilakukan, dan bukan terfokus terhadap sikap politiknya. Partisipasi politik mempunyai

dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan melalui kelompok politik dan pendekatan berdasarkan hak politik. Partisipasi politik masyarakat dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga secara langsung atau tidaknya memang berpengaruh kepada kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Faktor partisipasi politik masyarakat dalam pemilu sangat beragam, misalnya dalam suatu penelitian disebutkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pemilu bisa tinggi, hal ini bukan karena kesadaran sendiri, akan tetapi disebabkan karena adanya faktor *money politic* (Saiin, 2020).

Surbakti dalam (Mulyadi & Anyan, 2018) menyebutkan bentuk partisipasi politik dibagi menjadi konvensional dan non konvensional. Kegiatan politik konvensional merupakan bentuk umum partisipasi politik dalam sistem demokrasi modern, termasuk pemungutan suara, diskusi politik, partisipasi kampanye, pembentukan atau keanggotaan kelompok kepentingan, dan komunikasi personal dengan pejabat politik dan administratif. Sementara itu, bentuk partisipasi non-konvensional mencakup tindakan yang dapat bersifat legal, seperti mengajukan petisi, maupun ilegal dan bersifat kekerasan atau revolusioner. Ini termasuk mengajukan petisi, demonstrasi, konfrontasi, tindakan kekerasan politik terhadap properti (seperti vandalisme, pengeboman, dan pembakaran), kekerasan terhadap individu (seperti penculikan dan pembunuhan), bahkan perang gerilya dan revolusi (Singestecia, Handoyo, & Isdaryanto, 2018).

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Menjalankan peran dalam jabatan politik maupun administratif.
2. Berupaya memperoleh posisi dalam jabatan politik atau administratif.
3. Bertindak sebagai anggota aktif dalam organisasi politik.
4. Menjadi anggota pasif dalam organisasi politik.
5. Berpartisipasi aktif dalam organisasi semi-politik.
6. Bertindak sebagai anggota pasif dalam organisasi semi-politik.
7. Berpartisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan kegiatan serupa.
8. Berpartisipasi dalam diskusi politik informal.
9. Berpartisipasi dalam proses pemungutan suara (voting).

Jenis-jenis partisipasi politik yang umum diketahui yaitu dalam hal pemungutan suara dalam pemilihan umum untuk menentukan calon wakil rakyat dan juga Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden), karena hal tersebut sangat menentukan nasib pemerintahan dengan segala kebijakan yang nantinya dibuat oleh pemimpin negara.

Pemilih Pemula

Pemilih pemula di Indonesia terbagi atas 3 kelompok, diantaranya:

1. Pemilih rasional, yaitu mereka yang membuat pilihan politik berdasarkan pertimbangan dan analisis yang cermat.
 2. Pemilih kritis-emosional, yaitu kelompok pemilih yang cenderung idealis dan enggan berkompromi.
-

3. Pemilih pemula, yaitu individu yang menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali karena baru mencapai usia pemilih (Rachmat & Esther, 2016).

Pemilih pemula adalah seorang individu yang baru berusia 17 tahun dan telah memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Bab IV, Pasal 198 Ayat (1), pemilih baru adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemilihan, atau telah menikah, sehingga berhak memilih dan sebelumnya belum terdaftar sebagai pemilih sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 menegaskan bahwa hak memilih hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih yang disusun oleh penyelenggara pemilihan umum, dan pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau lebih atau telah menikah.

Masyarakat yang menjadi Pemilih Pemula terbagi atas 3 kategori, yakni:

1. Warga negara berusia 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Warga negara yang telah menikah meskipun berusia di bawah 17 tahun.
3. Warga negara yang telah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) (Mangune, Lengkong, & Lambey, 2018).

Pemilih muda atau pemilih pemula yang baru saja mendapatkan hak pilih, umumnya memiliki pengetahuan politik yang terbatas dan akses yang terbatas terhadap informasi politik yang komprehensif. Mereka bahkan cenderung apatis terhadap politik dan kurang tegas dalam menentukan pilihan. Hal ini seringkali membuat mereka hanya mengikuti pilihan orang tua, kerabat, atau pengaruh orang lain. Oleh karena itu, mereka tetap membutuhkan bimbingan, pembinaan, dan pengembangan potensi serta kemampuan agar dapat berperan optimal dalam kehidupan politik. Kurangnya pemahaman mengenai politik pada pemilih pemula ditambah dengan kuatnya pengaruh dinamika politik lokal, sering kali mengakibatkan perilaku mereka yang masih labil, acuh tak acuh, serta kurang peduli terhadap persoalan politik (Damanik, Bangun, Putra, Boangmanalu, Bangun, & Ivanna, 2023).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Cresswell dalam (Murdiyanto, 2020) penelitian kualitatif dipahami sebagai upaya untuk mengkaji fenomena sosial dan permasalahan manusia. Penelitian kualitatif juga dipandang sebagai strategi untuk menemukan makna, pemahaman, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskripsi suatu fenomena, dengan menggunakan pendekatan alamiah dan berbagai metode. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif, yaitu

penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran, penjelasan, atau pembuktian atas fenomena yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif, rumusan masalah harus relevan dengan penelitian, bernilai ilmiah, tidak terlalu luas cakupannya, dan didasarkan pada data faktual, bukan opini (Ramdhan, 2021). Untuk mendukung data primer, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, yang bersumber dari buku, jurnal, website, ataupun penelitian terdahulu untuk dijadikan pendukung dalam penelitian ini. Penelitian ini penting dilakukan karena partai politik memiliki peranan yang signifikan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula yang masih baru pertama kali memilih. Penelitian ini bertempat di DPD Gerindra Prov. Sumatera Utara dan di salah satu kelurahan pada Kecamatan Medan Helvetia, yaitu Kelurahan Helvetia Timur yang dilakukan mulai dari bulan Juni hingga Agustus dengan subjek penelitian yaitu Pengurus DPD Gerindra sebanyak 7 informan, dan Pemilih pemula sebanyak 6 informan. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, display data (penyajian data), dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Partai Dalam Fungsi Sosialisasi Politik

Dari hasil wawancara yang dilakukan, partai Gerindra sudah menjalankan perannya sebagai partai politik dalam pengadaan sosialisasi kepada pemilih pemula dengan memberikan pemahaman kepada mereka mengenai pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada, lalu dengan mengadakan kegiatan (*event*) tertentu, yang bertujuan untuk memperkenalkan partai dan anak muda atau pemilih pemula bisa mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing dalam bidang kesenian ataupun olahraga. Pembentukan sayap partai, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) guna mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam proses demokrasi serta sebagai penyambung aspirasi kaum muda, dan mempromosikan program partai kepada pemilih pemula, serta penyuluhan pendidikan politik yang disampaikan di sekolah-sekolah, media sosial, dan lain sebagainya. Namun, setelah dilakukan wawancara kepada pemilih pemula, dapat ditarik kesimpulan bahwa partai Gerindra belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsi sosialisasi politik secara langsung dan menyeluruh kepada pemilih pemula pada Pilkada 2024.

Meskipun beberapa informan menyebutkan pernah dalam hal mengikuti kegiatan sosial, seperti pemeriksaan kesehatan gratis atau penyuluhan umum yang diadakan oleh kader atau anggota legislatif dari partai Gerindra, namun kegiatan tersebut tidak secara spesifik mengedukasi pemilih pemula tentang pentingnya menggunakan hak pilih, prosedur teknis pemilu, atau pengenalan terhadap calon kepala daerah yang diusung partai. Sebagian informan mengaku memperoleh informasi mengenai pemilu lewat media sosial ataupun lingkungan pertemanan, bukan dari partai politik secara langsung. Sosialisasi yang

dilakukan oleh partai gerindra lebih bersifat umum dan simbolik, seperti ajakan untuk tidak golput, memilih pemimpin yang peduli rakyat, tanpa menyertakan materi edukasi yang sistematis dan interaktif. Hal ini menunjukkan bahwa peran partai gerindra dalam menjalankan fungsi sosialisasi masih bersifat pasif dan belum terfokus pada segmen pemilih pemula.

Disisi lain, partai gerindra menyebutkan mereka melakukan penyebaran informasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Hal ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi langsung, penyebaran spanduk, dan penggunaan media sosial. Namun, efektivitas sosialisasi ini masih bergantung pada aksesibilitas informasi, karena beberapa pemilih pemula tidak aktif mengikuti akun media sosial partai, sehingga membatasi jangkauan pesan.

Peran Partai Dalam Fungsi Komunikasi Politik

Salah satu yang menjadi fungsi dari partai politik ialah sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan politik kepada masyarakat. Dimana melalui komunikasi politik inilah masyarakat akan menerima pesan politik yang akan mempengaruhi opini dan meningkatkan partisipasinya dalam memilih calon pemimpin. Maka, peran partai sebagai sarana komunikasi politik sangat dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengurus partai gerindra, dapat diketahui bahwasanya komunikasi politik yang dilakukan oleh partai gerindra kepada pemilih pemula berupa dengan melalui pendekatan komunitas serta media digital. Mengajak generasi muda untuk bergabung dalam organisasi sayap partai gerindra yang bernama TIDAR (Tunas Indonesia Raya) dimana anggota partai ini memberikan edukasi kepada pemilih pemula mengenai pemilu, lalu merekalah yang menyampaikan ke lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Selain itu, partai gerindra juga menyediakan forum-forum diskusi terbuka untuk anak-anak muda yang datang ke kantor DPD tersebut maupun melalui jejaring sosial, sebab diketahui banyaknya anak muda yang aktif di media sosial tidak terpuhngkiri sedikit banyaknya mereka juga ingin mengetahui tentang calon yang diusung partai ataupun mekanisme pemilihan, serta visi-misi calon kepala daerah.

Di sisi lain berdasarkan pengakuan dari pemilih pemula, peran partai dalam menyampaikan komunikasi politik kepada mereka dengan menggunakan dua media utama, yaitu spanduk yang dipasang di pohon dan akun resmi partai gerindra di media sosial. Berdasarkan pengamatan dan keterangan dari informan, spanduk yang ditempel di pohon dinilai kurang efektif untuk menarik perhatian pemilih pemula. Hal ini disebabkan bentuk penyampaian pesan yang bersifat satu arah ini tidak memberikan ruang interaksi. Bahkan, sebagian pemilih pemula menilai bahwa spanduk di pohon lebih sering dipandang sebagai bagian dari ornamen politik yang sekedar mengisi ruang publik, tanpa memberikan pengetahuan politik yang mendalam. Sebaliknya, komunikasi politik melalui media sosial justru dipandang lebih sesuai dengan karakteristik

pemilih pemula. Media sosial memungkinkan pesan politik disampaikan secara cepat, menarik, dan interaktif. Pemilih pemula dapat mengakses informasi mengenai program, visi-misi, maupun kegiatan partai secara langsung melalui gawai mereka. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka lebih mengenal Gerindra melalui konten digital seperti unggahan foto dan video, daripada melalui spanduk di jalan. Dengan demikian, penggunaan media sosial memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi pemilih pemula karena mereka dapat berdialog, memberikan komentar, dan membangun pemahaman politik melalui interaksi digital.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dari berbagai informan kunci dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaksanaan fungsi sosialisasi politik kepada pemilih pemula di Kelurahan Helvetia Timur. Dari enam informan pemilih pemula, hanya dua orang yang mengaku pernah menerima undangan sosialisasi dari Partai Gerindra, sedangkan empat lainnya menyatakan tidak pernah mendapatkan kegiatan serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh partai belum menjangkau seluruh lapisan pemilih pemula secara merata.

Temuan ini sejalan dengan teori komunikasi politik yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi utama partai politik adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya kelompok pemilih pemula yang masih minim pengalaman dalam proses demokrasi. Ketidakmerataan sosialisasi dapat berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman serta partisipasi politik di kalangan pemilih pemula.

Selain itu, bentuk komunikasi politik yang lebih banyak dirasakan oleh pemilih pemula adalah melalui media spanduk yang terpasang di jalan-jalan utama. Media ini bersifat satu arah sehingga hanya memberikan informasi visual tanpa adanya ruang interaksi atau dialog politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik Partai Gerindra masih cenderung konvensional dan belum menyesuaikan dengan karakteristik pemilih pemula yang lebih akrab dengan media interaktif, seperti media sosial atau forum diskusi tatap muka.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh **Milbrath dan Goel (1977)**, partisipasi politik dibagi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari *apathetic* (tidak peduli politik), *spectator activities* (hanya sebatas melihat dan menerima informasi), hingga *gladiatorial activities* (ikut aktif dalam kegiatan politik). Berdasarkan temuan penelitian ini, pemilih pemula di Kelurahan Helvetia Timur lebih banyak berada pada tahap *spectator activities*, karena keterlibatan mereka sebatas menerima informasi melalui spanduk tanpa adanya keterlibatan langsung dalam diskusi politik maupun kegiatan partai. Hal ini menandakan bahwa Partai Gerindra belum mampu mendorong pemilih pemula untuk naik ke level partisipasi politik yang lebih aktif.

Selanjutnya, menurut **Ramlan Surbakti (1992)**, partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor komunikasi politik, sosialisasi politik, serta akses informasi yang diberikan oleh aktor politik. Minimnya sosialisasi yang dilakukan Partai Gerindra dan terbatasnya media komunikasi yang digunakan (hanya berupa spanduk) menyebabkan pemilih pemula tidak memperoleh pemahaman politik yang memadai. Kondisi ini berpotensi mengurangi partisipasi mereka dalam Pilkada 2024, karena partisipasi erat kaitannya dengan pengetahuan dan informasi yang diterima masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peran Partai Gerindra dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula masih belum optimal. Sosialisasi yang terbatas dan komunikasi politik yang cenderung pasif menandakan perlunya penguatan strategi komunikasi yang lebih intensif, merata, dan interaktif. Upaya yang dapat dilakukan misalnya melalui pemanfaatan media sosial, pendidikan politik secara langsung, serta penyelenggaraan forum diskusi yang memungkinkan pemilih pemula untuk lebih aktif terlibat. Apabila strategi ini tidak diperbaiki, maka potensi partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada 2024 di Kota Medan dikhawatirkan tidak akan maksimal.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap kendala. Pertama, kurangnya inovasi dalam metode penjangkauan, karena pendekatan konvensional masih dominan. Kedua, rendahnya literasi politik di kalangan pemilih pemula, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap informasi yang diberikan oleh partai politik. Ketiga, faktor eksternal, seperti pengaruh keluarga, teman sebaya, dan media lainnya, lebih dominan daripada pengaruh partai politik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai Peran Partai Gerindra dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024 di Kota Medan memiliki sejumlah implikasi penting, baik secara teoritis ataupun empiris. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini menegaskan dan memperluas teori fungsi partai politik yang dikemukakan oleh Fajlurrahman Jurdi (2019), khususnya pada fungsi sosialisasi dan komunikasi politik. Temuan menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan politik, pemanfaatan media sosial, serta kesadaran politik generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menegaskan bahwa keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsinya tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi dan kegiatan formal, tetapi juga oleh kemampuan partai dalam menyesuaikan strategi komunikasi politiknya dengan karakteristik generasi muda di era digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkaya teori fungsi partai politik dengan menambahkan

perspektif adaptasi digital dan pendekatan komunikasi yang lebih sesuai bagi generasi milenial dan Gen Z sebagai basis pemilih baru.

Secara empiris, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi praktis bagi Partai Gerindra di Kota Medan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula secara lebih optimal. Partai perlu memperkuat pendidikan politik yang bersifat interaktif dan berkelanjutan melalui kegiatan seperti seminar, pelatihan, atau program pendidikan politik di sekolah dan kampus. Selain itu, partai perlu lebih memanfaatkan media sosial secara kreatif, bukan hanya sebagai alat kampanye menjelang pemilu, tetapi juga sebagai sarana edukasi politik yang menarik dan informatif bagi generasi muda. Gerindra juga disarankan untuk membentuk komunitas pemuda binaan yang aktif dalam isu-isu sosial dan ekonomi lokal guna menumbuhkan rasa kepedulian politik. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal juga perlu ditingkatkan agar keberadaan partai lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pemilih muda. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat citra positif partai sekaligus mendorong tumbuhnya partisipasi politik yang sadar, kritis, dan rasional.

Adapun untuk penelitian selanjutnya (*future research*), disarankan agar peneliti lain dapat melakukan studi komparatif antara Partai Gerindra dan partai politik lainnya untuk melihat perbedaan efektivitas strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Penelitian di masa mendatang juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* agar mampu mengukur pengaruh sosialisasi dan komunikasi politik terhadap tingkat partisipasi politik pemilih muda secara lebih objektif. Selain itu, kajian yang lebih mendalam mengenai peran media sosial, algoritma penyebaran informasi, serta bentuk interaksi digital antar partai dan pemilih muda juga penting dilakukan. Penelitian lanjutan juga dapat memperhatikan aspek gender dan latar belakang sosial ekonomi sebagai variabel yang memengaruhi partisipasi politik. Dengan demikian, hasil penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi politik pemilih pemula di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan politik modern dan digitalisasi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. D. (2024, November 16). Dipetik Januari 24, 2025, dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/4471657/pemilih-pemula-dan-pengaruhnya-pada-pilkada-serentak-2024>
- Damanik, I. P., Bangun, J. A., Putra, B. A., Boangmanalu, V. S., Bangun, K. T., & Ivanna, J. (2023). Pemahaman Pemilih Pemula Terhadap Money Politic Menjelang Pemilu 2024 Pada Mahasiswa PPKn Unimed Stambuk 2023. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* , 798-804.
- Darmila, L., Ivanna, J., & Iqbal, M. (2019). Perilaku Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013. *Perspektif* , 58-71.
- Fales, S. (2018). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif. *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* , 200.
- Huda, N. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Ivanna, J., Pardede, A. J., & Iqbal, M. (2018). Peran Media Cetak Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS)* , 20-31.
- Jurdi, S. (2019). *Reaktualisasi Peran dan Fungsi Partai Politik*. Yogyakarta: Lab IPO UIN Alauddin.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mangune, I. O., Lengkong, J., & Lambey, T. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* , 1-12.
- Mukmin, B. A. (2012). Pilkada dan Kelemahan Negara. *Jurnal Kewarganegaraan* , 70-98.
- Mulyadi, Y. B., & Anyan. (2018). Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Kelam Permai Dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* , 102-110.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nababan, R. (2012). Internalisasi Nilai Karakter Melalui Pendidikan Politik Generasi Muda. *Jurnal Kewarganegaraan* , 26-40.
- Rachmat, H. B., & Esther. (2016). Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 25-35.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Saiin, A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Perspektif Good Governance. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* , 130-147.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.
-

- Sihite, D. V., Br. Sembiring, E., Rachma, A., & Ivanna, J. (2024). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik di Kalangan Mahasiswa PPKn Universitas Negeri Medan. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* , 100-103.
- Silalahi, M. M., Pinem, W., & Sembiring, G. P. (2025). Pendidikan Politik Menjelang Pilkada 2024 di SMAS Budi Satrya Medan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* , 646-654.
- Singestecia, R., Handoyo, E., & Isdaryanto, N. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal* , 63-72.
- Siregar, D. M., Manik, A., Manurung, R. G., Harahap, A., & Ivanna, J. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* , 89-94.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
-